KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : SE-36/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
IDENTITAS GANDA

Lampiran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-36/PJ/2012
Tanggal : 2 Juli 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251609, 5262880; FAKSIMILI (021) 5207204; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.goid

BERITA ACARA
Nomor : BA- /PJ.101/.....

PENGHAPUSAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI IDENTITAS GANDA

1. Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ....., berdasarkan :
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
   b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 26/PJ/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Pengguna Ganda.
   c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang penyampaian Peraturan Direktur Nomor 26/PJ/2008.
   d. Surat Edaran Kepala Pusat PDIP Nomor SE-08/PJ.94/1997 tanggal 3 September 1997 tentang Penyelesaian NPWP Ganda.

   telah dilakukan perubahan status DE pada Identitas Ganda pada Master File Nasional di Master File Nasional sebanyak ..... (*dalam angka*) Wajib Pajak sebagaimana terlampir.

2. Adapun ketentuan pelaksanaan penghapusan Identitas Ganda ini didasarkan pada hal-hal berikut:
   a. Identitas Ganda adalah 1 WP memiliki 2 (dua) atau lebih NPWP.
   b. Data Identitas Ganda diolah dari MFWP Nasional per tanggal .....
   c. Data Identitas Ganda dilakukan konfirmasi terhadap data transaksi WP yaitu:
      - data MPN tahun pembayaran .....
      - data pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun pajak .....
      - dan data pelaporan SPT Masa 21/22/23/24/25/26/4(2) dan PPN Tahun Pajak .....
   d. Terhadap data Identitas Ganda yang tidak memiliki data transaksi sebagaimana huruf c di atas diberlakukan ketentuan :

NO	NAMA	KPP	NPWP	Status	Tahun Daftar	Tindakan
1	ABC	KPP Pratama A	aa.aaa.aaa.a	Normal	2006	PL
		KPP Pratama B	bb.bbb.bbb.b	PB	2008	tetap
2	XYZ	KPP Pratama A	cc.ccc.ccc.c	Normal	2007	DE
		KPP Pratama A	dd.ddd.ddd.d	Normal	2009	tetap

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal .....

Kepala Seksi Pelayanan Aplikasi & Registrasi	Petugas 1	Petugas 2
..... NIP.....	..... NIP.....	..... NIP.....

Direktur,	Kasubdit Pelayanan Operasional
..... NIP.....	..... NIP.....